

Tahun	2023	Kelompok	-
Judul Inovasi	LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu MaLePPu	Tanggal Mulai Inovasi	-
Instansi Pelaksana	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URL Bukti Inisiasi Inovasi	LINK
Wilayah	KABUPATEN BARRU		
Nama Inovator	nurmayasari, s.sos.		

Detail Proposal

1. Ringkasan

Inovasi ini dinamai LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu MaLePPu (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan berSinergi dengan Desa/Kelurahan, Media dan Lembaga Penyiaran Publik) digagas dan diimplementasikan untuk mengatasi kurangnya kegiatan sosialisasi/penyebaran informasi yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil karena terbatasnya sumber daya keuangan, sarana, dan sumber daya manusia pelaksana yang kemudian diidentifikasi menjadi faktor determinan terhadap rendahnya partisipasi/kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke Disdukcapil secara cepat atau tepat waktu. Pada intinya inovasi ini mengajak stakeholder terkait untuk bersinergi/membersamai melakukan kegiatan sosialisasi/penyebaran luasan informasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak dan menggunakan sumberdaya yang dimilikinya dengan memprioritaskan Pemerintah Desa karena Pemerintah Desa juga mempunyai tanggung jawab yang sama dan terdepan dalam memberikan layanan kepada warganya dan Desa saat ini memiliki sumber daya keuangan, SDM, sarana dan fasilitas yang cukup memadai untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang dibutuhkan masyarakat tidak terkecuali kegiatan sosialisasi/penyadaran yang berkaitan dengan pelayanan Administrasi kependudukan melalui tatap muka yang efektif merubah sikap masyarakat kearah yang diinginkan. Dengan melihat tujuan dan dampak dari inovasi ini, maka dapat dikatakan bahwa inovasi ini dapat digolongkan kedalam kategori pelayanan Publik yang inklusif dan berkeadilan membangun sinergitas dengan stakeholder dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Link ([Link Bukti Dukung](#))

<https://drive.google.com/drive/folders/1FFHZTEthDwdTnJPV8324JNAnwj4jGt6K?usp=sharing> .([Link Vidio Inovasi You Tube](#)) <https://youtu.be/DsAewMpPsFA>

2. Ide Inovatif

Barru adalah salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan terletak 100 km arah Utara Ibu Kota Provinsi (Makassar) wilayahnya membentang dari Selatan ke Utara berada dipesisir selat Makassar dengan garis pantai sepanjang 78 km. Dilintasi Jalan Trans Sulawesi (Makassar-Manado) memiliki luas wilayah 1.174,72 km dan berpenduduk 190.529 jiwa pada tahun 2022 tersebar di 7 kecamatan pada 55 Desa/Kelurahan dengan rupa topografi berbukit dan bergunung meliputi daratan rendah, sedang, dan tinggi dengan rata-rata ketinggian 300 m dari permukaan laut, sedangkan jarak tempuh atau orbitasi pemukiman terjauh dari Ibu Kota Kabupaten atau pusat pemerintahan adalah 60 km atau 2 jam waktu tempuh, adapun matapencaharian utama masyarakat pada umumnya adalah petani dan nelayan. Kabupaten Barru dibawah Kepemimpinan Ir.H.SUARDI SALEH,M.Si. terus berbenah di semua aspek kehidupan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana Visi Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan

sebagaimana dituangkan dalam Visi Pelayanan yakni “TERWUJUDNYA LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT”. Adapun LaNCAR D’DUKCAPIL merupakan akronim dari Layanan yang Nyaman, Cepat, Akurat, dan Ramah Dalam menerbitkan Dokumen KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Bahwa salah satu masalah yang masih dihadapi oleh para instansi pelaksana dalam mewujudkan data yang akurat, valid dan uptodate adalah rendahnya partisipasi/kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ke instansi pelaksana (Disdukcapil) secara cepat atau tepat waktu, hal inipun menjadi perhatian Pemerintah Pusat sebagai masalah prioritas untuk segera ditangani atau ditindak lanjuti oleh para instansi pelaksana di Kabupaten/Kota yakni dengan dilaunchingnya Program Nasional Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) pada tahun 2018 di Batam Provinsi Riau, diidentifikasi bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat melakukan pelaporan ketika mengalami peristiwa kependudukan dan peristiwa penting secara tepat waktu adalah kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan administrasi Kependudukan yang diakibatkan kurangnya kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi yang diselenggarakan oleh instansi pelaksana baik yang dilakukan secara tatap muka, maupun melalui media massa, media sosial, lembaga penyiaran publik (Radio). Adapun penyebab keadaan atau kondisi ini terjadi adalah terbatasnya sumberdaya keuangan yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi dimaksud, berangkat dari kondisi/masalah tersebut kemudian digagaslah suatu ide untuk mengatasinya yakni membangun sinergitas dengan stakeholders terkait sebagai suatu inovasi yang dinamai LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu MaLePPu (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan bersinergi dengan Desa/Kelurahan, Media dan Lembaga Penyiaran Publik). Dengan terimplementasikannya inovasi ini dengan baik, maka diyakini masalah dapat diatasi yang tentu berdampak pada peningkatan kualitas data yang diperoleh dari pelaporan tepat waktu dari warga/masyarakat. Adapun sisi kebaruan dari inovasi ini adalah dengan menjadikan Pemerintah Desa sebagai stakeholder sasaran prioritas untuk memfasilitasi penyebaran informasi penting terkait Administrasi Kependudukan melalui tatap muka yang diyakini efektif dapat mengatasi masalah. Bahwa kenapa pula membiayai/mengadakan kegiatan sosialisasi melalui tatap muka dan mengapa Pemerintah Desa yang menjadi pihak yang diprioritaskan diantara stakeholders lainnya dalam penyebaran informasi. Jawabnya adalah Pemerintah Desa juga mempunyai tanggung jawab yang sama dan terdepan dalam memberikan layanan kepada warganya dan sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Desa memiliki sumberdaya keuangan yang cukup memadai untuk membiayai berbagai kegiatan yang dibutuhkan masyarakat tidak terkecuali kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan Administrasi Kependudukan. Nilai tambah lain dengan inovasi ini adalah terjadinya efisiensi anggaran pada Dinas Dukcapil untuk digunakan membiayai kegiatan sosialisasi di seluruh Desa secara berkelanjutan, sementara kegiatan sosialisasi untuk masyarakat di Kelurahan pembiayaannya dianggarkan di DPA Disdukcapil.

Link https://drive.google.com/drive/folders/13Pcz7Y8zgLiykRw8mVF7rid8Ehv1qrlp?usp=share_link

3. Signifikansi

Setelah inovasi ini digagas dan diberi nama LaNCAR D’DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu MaLePPu, diksi “MaLePPu” dalam bahasa daerah Bugis sebagaimana bahasa lokal sehari-hari digunakan masyarakat kabupaten Barru yang berarti “Peduli”, hal ini relevan dengan apa tujuan inovasi ini diimplementasikan yakni mengajak stakeholders terkait untuk peduli bersama-sama bersinergi mengatasi masalah rendahnya kesadaran/partisipasi masyarakat yang diidentifikasi disebabkan kurangnya kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi, maka selanjutnya di bentuk Tim kerja yang akan membahas dan melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan. Mengenai tahapan atau urutan kegiatan seperti apa gambaran implementasi inovasi ini diuraikan secara singkat sebagai berikut:

- Tim dalam mengawali tugas yakni melakukan sosialisasi atau memperkenalkan inovasi kepada pihak atau stakeholder terkait untuk diajak bersinergi mengimplementasikan atau mendukung inovasi ini, adapun bukti komitmen kesediaan mendukung

inovasi dari stakeholders dimaksud dinyatakan dalam pernyataan dukungan secara tertulis dan ditandatangani pada momen kegiatan launching inovasi ini oleh Bupati pada tahun 2020. • Tim mengintensifkan koordinasi atau komunikasi dengan stakeholders baik melalui Grup Whatsap, komunikasi telepon dan tatap muka (kunjungan/rapat) untuk memastikan Rencana tindak lanjut dapat berjalan dengan baik, misalnya seperti apakah masing-masing desa sudah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan sosialisasi/Penyadaran masyarakat terkait Administrasi Kependudukan, kapan dan dimana kegiatan dilaksanakan. • Pelaksanaan kegiatan sosialisasi/penyadaran masyarakat terkait dengan administrasi kependudukan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh Pemerintah Desa dengan menghadirkan narasumber dari Disdukcapil telah berjalan baik sejak tahun 2021. Dari data yang ada bahwa pada tahun 2021 baru terdapat 27 Desa yang melaksanakan kegiatan sosialisai atau 70% dari 40 desa yang ada, dan pada tahun 2022 tersisa 1 (Satu) Desa yang belum melaksanakan kegiatan sosialisasi namun masyarakat desa ini dapat mengakses informasi terkait administrasi kependudukan melalui siaran Radio Iga FM (Lembaga Penyiaran Publik sebagai salah satu stakeholder yang diajak bersinergi dalam kegiatan penyebaran informasi) diacara yang dikemas dengan DMM (Disdukcapil Menyapa Masyarakat) karena Desa ini berada dalam jangkauan radar Radio IGA FM. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di tahun 2022 terdapat beberapa desa melaksanakan lebih intensif di beberapa dusun dan bahkan Desa yang memiliki jumlah dusun yang kecil telah melaksanakan kegiatan sosialisasi di masing-masing Dusun. Dengan memperhatikan hasil dari implementasi inovasi ini dalam 2 (Dua) tahun terakhir sebagaimana diuraikan di atas, maka diyakini inovasi ini memberi dampak signifikan dalam mengatasi masalah rendahnya partisipasi/ kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya ke instansi pelaksana (Disdukcapil) secara cepat atau tepat waktu. Keyakinan tersebut didukung dengan data yang dapat ditampilkan dari hasil atau jumlah penerbitan akte kelahiran terhadap anak yang berusia 0-1 Tahun sebelum dan sesudah diimplementasikannya inovasi ini dengan memperhatikan kode penomoran akte lahir yang diterbitkan dari Aplikasi SIAK yang menjelaskan bahwa kelahiran anak tersebut apakah tepat waktu atau terlambat dilaporkan pada instansi pelaksana (Disdukcapil), kode dimaksud yakni "LU" dicantumkan secara otomatis oleh aplikasi SIAK pada penomoran akte kelahiran yang diterbitkan dengan kategori laporan tepat waktu, dan kode "LT" dicantumkan pada penomoran akte kelahiran yang diterbitkan dengan kategori terlambat dilaporkan. Adapun data dimaksud adalah sebagai berikut: Jumlah Akta Kelahiran yang terbit dengan kategori laporan tepat waktu setelah inovasi ini diimplementasikan (data tahun 2021) yakni sebanyak 943 lembar atau 66,32 % dari keseluruhan akta yang diterbitkan usia 0-1 Tahun, sementara jumlah akta yang diterbitkan dengan kategori terlambat dilaporkan sebanyak 479 lembar atau 33,68 % dari keseluruhan akta yang diterbitkan, dibandingkan dengan data yang diperoleh pada tahun 2020 terdapat jumlah akta yang terbit dengan kategori laporan tepat waktu sebanyak 771 lembar atau 56,32 % dari keseluruhan akte yang diterbitkan usia 0-1 tahun dan jumlah akte yang terbit dengan kategori terlambat dilaporkan yakni sebanyak 568 lembar atau 43,68 % dari keseluruhan akte yang diterbitkan.

Link <https://drive.google.com/drive/folders/1ACRV7w3fW6o3xg8Uj1CARqRavBcPTcaT?usp=sharing>

4. Kontribusi Terhadap Capaian TPB

Dengan melihat masalah yang melatarbelakangi tujuan bersama, siapa, serta bagaimana inovasi LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu diimplementasikan, dan dengan memperhatikan pula goals dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang merupakan kesepakatan pada umumnya negara anggota PBB untuk mewujudkan kondisi kehidupan warga dunia lebih aman, lebih damai, berkeadilan dan lebih sejahtera untuk dicapai secara bersama-sama di tahun 2030, yang di Indonesia dilaksanakan berdasarkan peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan ditindak lanjuti dengan penyusunan RAD masing-masing Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang disinkronkan dalam RPMD, maka inovasi LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 GISA SiDesaKu lebih dominan berkontribusi kearah pencapaian tujuan

ke 17 dari TPB yaitu Kemitraan untuk mencapai tujuan, bahwa keterlibatan para pihak bersama-sama bersinergi melakukan peran sesuai tanggungjawab dan kewenangan masing-masing melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan menjadi indikator keberhasilan dari inovasi ini yang tujuan utamanya adalah terciptanya data yang valid, akurat dan update bagi keperluan penyelenggaraan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, penentuan pengalokasian anggaran, pembangunan hukum dan politik, indikator pencapaian pembangunan, dan kebutuhan pembangunan lainnya. Bahwa untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperlukan data tk. pendidikan setiap penduduk untuk mengetahui rata-rata lama sekolah seluruh penduduk, demikian pula diperlukan jumlah penduduk untuk menentukan jumlah anggota DPRD suatu Daerah.

Link

https://drive.google.com/drive/folders/14NdjPoThqMS7JjmWT30BzfTkH99GbVMO?usp=share_link

5. Adaptabilitas

Inovasi GISA SiDesaKu MaLePPu diakui belum direplikasi oleh pihak/daerah lain namun beberapa daerah telah melakukan kunjungan atau bertandang di instansi kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau melakukan pendalaman terkait dengan beberapa inovasi yang telah kami implementasikan sejak 2020 sebagai pengejawantahan dari komitmen kami untuk terus melakukan terobosan-terobosan atau melahirkan inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus sebagai penjabaran dari Visi Pelayanan instansi kami yakni LaNCAR D'DUKCAPIL 7311 MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT. Walaupun belum ada pihak atau OPD disdukcapil daerah lain yang mereflikasi inovasi ini akan tetapi setidaknya bagi kami secara jujur mengakui bahwa inovasi ini dapat terimplementasi secara efektif dan efisien mengatasi masalah rendahnya kesadaran masyarakat melakukan pelaporan ketika mengalami peristiwa kependudukan dan peristiwa penting secara tepat waktu yang tentunya pula berimplikasi pada pencapaian kinerja atau target nasional pada semua indikator (1.Perekaman usia 17 Tahun, 2. Penerbitan KIA, 3. Penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18 Tahun, 4. Perjanjian kerja sama(PKS) pada dua tahun terakhir ini kecuali indikator PKS. sehingga dapat kami menilai inovasi ini memiliki potensi untuk direflikasi daerah lain karena daerah lain pun memiliki masalah yang sama, bahkan masalah ini sudah menjadi perhatian serius pemerintah Pusat ditandai dengan dilaunchingnya Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) sebagai program Nasional pada hari Kamis, 8 Pebruari 2018 pada momen Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) oleh Menteri Dalam Negeri TJAHYO KUMOLO di Hotel One & Convention Center Batam Kepulauan Riau. Program ini mendorong daerah Kabupaten/Kota melalui instansi pelaksana untuk mengintensipkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi namun kenyataannya tidak semua daerah mampu melaksanakannya dengan baik dan berkesinambungan karena terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada instansi pelaksana (Disdukcapil) sebagai akibat dari antara lain diberhentikannya dana transfer DAK non fisik dari Pusat kepada Disdukcapil di tahun 2022 , kondisi ini lebih terasa bagi Daerah yang memiliki jumlah penduduk dan jumlah Desa/kelurahan yang banyak, terhadap daerah yang mengalami kondisi seperti digambarkan tersebut sangatlah tepat mereflikasi inovasi ini karena disamping mudah penerapannya juga efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan /mengatasi masalah, namun bagi Daerah atau Kota yang hanya memiliki struktur pemerintahan kelurahan tidak direkomendasikan untuk mereflikasi inovasi ini karena media tatap muka kurang efektif dalam menyampaikan informasi dan cukup tersedia media cetak, media elektronik, media sosial yang mudah diakses oleh warga tanpa meninggalkan pekerjaan atau rutinitasnya.

Link https://drive.google.com/drive/folders/1JL_JWi1UzEDMyJmBQIYGtCa6zQNG73d7?usp=sharing

6. Keberlanjutan

Bahwa inovasi GISA SiDesaKu MaLePPu ini telah berjalan selama 2 tahun dengan baik dan untuk memastikan bahwa inovasi ini dapat terus berjalan dari tahun ke tahun, maka pertama Tim inovasi ini harus di pantau dan di evaluasi oleh Pimpinan untuk memastikan apakah proses bisnis berjalan

sesuai tujuan dibentuknya Tim dalam merealisasikan Rencana Tindak Lanjut atau target akan dicapai, dari hasil evaluasi dimaksud Pimpinan memberikan arahan, memotivasi, atau dukungan ikut bergerak bersama-sama tim untuk mengatasi masalah yang dihadapi di lapangan, dan Pimpinan setiap tahun memperbaharui Tim yang bertujuan untuk mengefektifkan tim dalam bekerja. Bahwa Tim harus mengintensifkan melakukan koordinasi dengan stakeholder pada saat dan waktu yang tepat seperti pada saat sebelum diselenggarakannya kegiatan musrenbang Desa dimana Tim melakukan komunikasi kepada pihak desa untuk memastikan bahwa desa mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan sosialisasi pada tahun berikutnya atau dialokasikan pada fase perubahan anggaran bila memungkinkan dapat dilaksanakan ditahun berjalan sekiranya Desa alpa mengalokasikan pada anggaran pokok. Koordinasi atau komunikasi serupa juga dilakukan dengan pihak instansi yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan pembinaan kepada Desa agar dapat memfasilitasi desa mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Memberikan penghargaan kepada takeholder dilakukan dalam bentuk piangan sebagai bentuk apresiasi kepada Desa yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang tentu bertujuan agar Desa dapat terus bersinergi mengimplementasikan inovasi dari waktu ke waktu dan menjadi indikator atau bukti bagi Pemerintah Desa komitmen memberikan layanan yang dibutuhkan oleh warganya . Dari pihak lain (eksternal) yang turut membantu dalam keberlangsungan inovasi ini adalah dukungan dari media memberitakan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa hal ini juga tentunya berefek memotivasi desa untuk terus melanjutkan kegiatan ini pada tahun berikutnya demikian pula dukungan yang sama diberikan oleh satkeholdes lainnya. Aspek lain yang dominan mendorong keberlanjutan inovasi ini adalah terbatasnya anggaran yg dialokasikan pada disdukcapil untuk membiayai seluruh Program/kegiatan yang telah ditetapkan mengharuskan instansi kami mengajak stakeholder bersinergi dengan memprioritaskan Pemerintah Deasa dalam mengatasi masalah, disamping itu dengan tingginya dinamika yang terjadi dalam masyarakat dimana setiap penduduk tentu mengalami peristiwa kepedudukan dan peristiwa penting yakni kelahiran, mengikuti pendidikan, memperoleh pekerjaan, menikah, cerai, berpindah tempat tinggal, meninggal dan sebagainya dimana setiap peristiwa tersebut wajib dilaporkan tepat waktu dengan memberikan keterangan/data yang tepat, valid dan akurat ke instansi pelaksana Disdukcapil untuk dicatat dan diterbitkan dokumennya, hal inipun juga dapat dikatakan sebagai faktor yang menghendaki inovasi ini dapat terlaksana secara berkesinambungan. Bahwa dengan telah dilounchingnya Gerakan Indonesia Sadar administrasi Kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional Administrasi Kependudukan di Batam provinsi Riau Tahun 2018 menandakan pula bahwa Partisipasi/kesadaran masyarakat berskala nasional masih rendah dan menjadi perhatian serius oleh Pemerintah, karenanya penyadaran masyarakat melalui sosialisasi/penyebaran informasi harus dimasifkan secara bersama-sama dan serentak di seluruh pelosok tanah air, gerakan ini tentunya akan berdampak pada tersedianya data yang valid, akurat dan update menuju SATU DATA INDONESIA untuk keperluan pelayanan publik baik yang disediakan oleh pemerintah, BUMN/BUMD maupun Swasta, untuk Perencanaan, pembangunan Hukum /politik, dan pembangunan sektor lainnya, hal ini menuntut keseriusan masing-masing pemerintah daerah melalui OPD yang diberi kewenangan menyelenggarakan Administrasi Kependudukan untuk berdaya-upaya mengintensipkan kegiatan sosialisasi/penyebaran inforamsi kepada seluruh masyarakatnya, maka dalam rangka ini pulalah inovasi ini digagas dan diimplementasikan secara berkesinambungan.

Link <https://drive.google.com/drive/folders/1mi6mHYdPtrS8Cz1L9SE51JsgLMyJOwt?usp=sharing>

7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan

Pada poin terdahulu telah dikemukakan bahwa faktor yang menjadi kunci keberhasilan dari inovasi ini adalah keterlibatan stakeholders dalam menangani masalah rendahnya partisipasi/kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kepdudukan dan peristiwa penting yang dialaminya secara tepat waktu kepada instansi Disdukcapil untuk dicatat dan diterbitkan dokumennya. Adapun stakeholders dan peranannya dalam pengimpenmentasian dan dalam memastikan keberlanjutan inovasi ini adalah: a. Bupati, berperan memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh Pimpinan

OPD staf pada berbagai momen agar terus meningkatkan kualitas pelayanan antara lain dengan melakukan terobosan-terobosan atau inovasi sesuai bidang tugas masing-masing. b. Kadis DPMD, PPKB, PPPA., berperan memastikan pengalokasian anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sosialisasi tatap muka di Desa dan keberlanjutan inovasi di Desa. c. Media (cetak/elektronik) dan Lembaga Penyiaran Publik (media Radio IGA FM), d. Pemerintah Desa, peran atau keterlibatan desa dalam inovasi ini menjadi perhatian utama bagi keberhasilan inovasi ini. Bahwa semua/40 Desa telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBDesa. e. Pemerintah Kelurahan, berperan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi yakni menghadirkan peserta, menyediakan tempat dan fasilitas yang dibutuhkan bagi terlaksananya kegiatan dengan baik, yang diselenggarakan oleh Disdukcapil, dan telah tuntas kegiatan ini dilaksanakan di 15 Kelurahan pada tahun 2022.

Link https://drive.google.com/drive/folders/1rc5WOOhdN_OL0kSQIvgaQTjOEx-LBkQb?usp=sharing